

## ABSTRAK

Nama : Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara  
Program Studi : Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penyelesaian Banding Administratif PNS di Badan Pertimbangan Kepegawaian Mengenai Pembatalan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Dalam Kasus PNS Wanita Menjadi Istri Kedua

*Dalam PP No.10/1983 jo. PP No.45/1990 Pasal 4 Ayat 2, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Jika dilanggar, berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 PP No.10/1983, PNS wanita tersebut dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Meskipun demikian, penjatuhan hukuman disiplin itu tidak serta merta bersifat final, jika PNS tersebut melakukan banding administratif. Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah PNS wanita memenangkan upaya banding terkait kasus menjadi istri kedua, untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi kemenangan tersebut. Peneliti menggunakan metode studi pustaka dan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pada tahapan pemeriksaan, Tim Pemeriksa gagal mengungkapkan hal-hal penting yang justru terungkap dan menjadi pertimbangan oleh BAPEK untuk memenangkan Penggugat dalam upaya banding tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pada dasarnya pembatalan hukuman disiplin terhadap YG dalam kronologis kasus pelanggaran larangan menjadi istri kedua/ketiga/keempat merupakan kegagalan Tim Pemeriksa mengungkapkan hal-hal penting yang justru terungkap dan dijadikan oleh BAPEK sebagai pertimbangan pembatalan tersebut. Hal-hal tersebut antara lain:(1) Pemalsuan surat izin poligami; dan (2) pembatalan pernikahan Penggugat YG dengan Tergugat BTB di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga disarankan setiap tahapan harus dilakukan sungguh-sungguh, terutama pada tahap pemeriksaan. Pemeriksaan harus sungguh dilakukan untuk menemukan akar permasalahan, agar rekomendasi ataupun keputusan yang diambil menjadi tepat dan tanpa celah hukum.*

**Kata Kunci:** Banding Administratif, PTUN, PNS Wanita Menjadi Istri Kedua

## ABSTRACT

*Name* : Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara  
*Study Program* : State Administration Interests Personnel Administration and Management  
*Title* : *Review of Administrative Appeals Resolution for Civil Servants at the Personnel Deliberation Agency Regarding the Revocation of the Decision on Disciplinary Punishment for a Female Civil Servant in the Case of Becoming a Second Wife.*

*In accordance with Government Regulation No. 10/1983, as amended by Government Regulation No. 45/1990 Article 4 Paragraph 2, female civil servants are not allowed to become second/third/fourth wives. Violation of this rule, as stipulated in Article 15 Paragraph 2 of Government Regulation No. 10/1983, results in the dismissal or dishonorable discharge of the female civil servant from government service. However, the imposition of disciplinary punishment is not necessarily final if the female civil servant chooses to file an administrative appeal. This study focuses on the case of a female civil servant who successfully appealed her disciplinary punishment related to becoming a second wife, aiming to identify the underlying factors contributing to her success. The researcher employed literature review and interviews to gather necessary data, which was then analyzed using a descriptive approach. The research findings indicate that during the examination stage, the Examination Team failed to uncover crucial details that were later revealed and considered by the Personnel Deliberation Agency (BAPEK) in favor of the appellant during the appeal process. Consequently, it can be concluded that the annulment of disciplinary punishment against the appellant in the chronological context of violating the prohibition on becoming a second/third/fourth wife was due to the Examination Team's failure to uncover vital details that were subsequently acknowledged by BAPEK as grounds for annulment. These details include: (1) the falsification of polygamy permission documents, and (2) the annulment of the marriage between the appellant and the respondent at the Office of Religious Affairs (KUA). Therefore, it is recommended that each stage of the process be conducted diligently, particularly during the examination phase. Thorough examinations are essential to uncover the root causes of issues, ensuring that recommendations or decisions made are accurate and legally sound.*

**Keywords:** *Administrative Appeal, Administrative Court (PTUN), Female Civil Servants Becoming Second Wife.*